

ANALISIS DUKUNGAN VANUATU TERHADAP UPAYA KEMERDEKAAN PAPUA

Pratama Dinul Kusuma, Ganjar Widhiyoga, Andika Drajat Murdani

Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi

Email : pratamadinulc@gmail.com

Abstrak

Vanuatu merupakan salah satu negara yang sangat vokal dan aktif dalam memberikan dukungan terhadap Papua. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Vanuatu dengan mengangkat permasalahan ini dalam beberapa forum dewan PBB. Dengan memakai isu pelanggaran HAM di Papua, Vanuatu sangat rutin menyerang Indonesia dalam setiap kesempatan. Penelitian ini bertujuan menganalisa dukungan yang diberikan oleh Vanuatu atas upaya kemerdekaan Papua atas Indonesia. Dalam hubungan internasional selalu ada kepentingan nasional atas hubungan yang dilakukan baik antar negara ataupun aktor non-negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi pustaka yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan sumber lainnya. Objek penelitian ini adalah dukungan Vanuatu, gerakan kemerdekaan Papua, dan motif dukungan Vanuatu atas Papua. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga motif atas dukungan yang dilakukan oleh Vanuatu yaitu adanya kesamaan ras antara Vanuatu dan Papua, keinginan Vanuatu menjadi pemimpin wilayah Asia Pasifik, dan adanya orientasi politik domestik juga luar negeri Vanuatu.

Kata Kunci: *Vanuatu, kepentingan nasional, kesamaan ras, pemimpin wilayah, orientasi politik*

Abstract

Vanuatu is a country that is very vocal and active in providing support for Papua. This can be seen from the efforts made by Vanuatu by raising this issue in several UN council forums. By using the issue of human rights violations in Papua, Vanuatu very regularly attacks Indonesia at every opportunity. This study aims to analyze the support given by Vanuatu for Papuan independence efforts over Indonesia. In international relations, there is always a national interest in relations between states and non-state actors. The research method used in this research is descriptive qualitative with data sources collected through literature studies derived from books, journals, newspapers and other sources. The object of this research is Vanuatu's support, the Papuan independence movement, and the motives for Vanuatu's support for Papua. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that there are three motives for the support provided by Vanuatu. That are the existence of racial similarities between Vanuatu and Papua, Vanuatu's desire to become the leader of the Asia Pacific region, and the existence of Vanuatu's domestic and foreign political orientations.

Keywords: *Vanuatu, National interest, Racial similarities, Region leader, Political orientation*

Pendahuluan

Isu seputar keamanan merupakan salah satu isu penting yang berkembang dari dulu hingga sekarang dalam studi hubungan internasional. Berakhirnya Perang Dingin memberikan harapan baru bagi terciptanya sebuah tatanan dunia yang lebih damai dan aman (Mauna, 2008). Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem internasional bipolar, dan telah mengakhiri persaingan bernuanasa militer dan juga persaingan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet (Charles W, Eugne R, & Kegley, 2004). Menurut Fukuyama, penyebab konflik dan perang antarnegara selama ini adalah persaingan ideologi sehingga dengan berakhirnya perang dingin akan berakhir pula perang ideologi di dunia. Berakhirnya Perang Dingin dengan sendirinya akan mengakhiri perang antarnegara, khususnya antarnegara yang demokratis (Holsti, 1995).

Namun ternyata hilangnya perang dingin tidak berarti menghilangkan konflik secara keseluruhan dan tidak pula berarti bahwa dunia sudah aman dan perdamaian dimana-mana. Dibanyak tempat masih terdapat sengketa bersenjata, agresi militer, campur tangan asing dan juga konflik-konflik internal di dalam negara. Ketika perang antar negara maju hanya merupakan masa lalu, masih ada beberapa sengketa atas dasar konflik agama, suku, nasionalisme, dan juga konflik yang terjadi akibat sengketa tapal batas wilayah (Mauna, 2008).

Konflik bisa saja terjadi di dalam satu negara sebagaimana isu yang terjadi di Indonesia, yakni gerakan separatisme di Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Papua sebagai salah satu wilayah Indonesia di bagian timur merupakan wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Secara geografis, populasi dan juga kultur, sangat sulit untuk mengintegrasikan Papua kedalam NKRI karena papua dilingkari oleh negara-negara di Pasifik Selatan (Nainggolan, 2014).

Gerakan ini bermula dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas kebijakan nasional yang belum mensejahterakan masyarakat Papua secara optimal, dan upaya pemerintah yang mengedepankan penyelesaian konflik di Papua dengan cara militer menimbulkan spiral kekerasan yaitu timbulnya dendam dan juga kekerasan yang baru (Ratriyanti, 2018). Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya diskriminasi termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi Papua bagi Indonesia, infrastruktur dan

pembangunan yang belum optimal khususnya pendidikan; kesehatan; dan; ekonomi rakyat, dan siklus kekerasan ditambah pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan (Elisabeth, 2017).

Isu ini kembali memanas pasca terjadinya tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya yaitu terjadinya penggerebekan oleh aparat TNI diikuti oleh Satpol PP dan Ormas di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan Nomor 10, Surabaya yang berujung dengan penangkapan 42 mahasiswa yang disebabkan adanya kesalahpahaman atas jatuhnya bendera merah putih di depan asrama tersebut (Arigi, 2019). Gerakan inipun semakin terkoordinasi seiring dengan pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang di deklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu (Sabir, 2018). Gerakan ini juga didukung oleh beberapa negara yang tergabung dalam *Melanesia Spearhead Group* (MSG) yang salah satu anggotanya adalah Negara Vanuatu.

Penelitian kali ini akan membahas tentang dukungan MSG khususnya Vanuatu dalam upaya kemerdekaan Papua dari Indonesia. Vanuatu merupakan sebuah negara kecil yang berada di kawasan Melanesia. Vanuatu aktif dan vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Papua. Dengan memakai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat, Vanuatu dan Kepulauan Solomon telah mengangkat permasalahan ini ke beberapa forum dewan PBB antara lain pada sidang tahunan ke-68 Majelis Umum PBB pada 28 September 2013 di New York dan juga dalam sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss pada 4 Maret 2014. (Sabir, 2018)

Kajian ini menjadi penting dikarenakan dukungan yang diberikan Vanuatu sudah pada tahap intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia dimana Vanuatu dalam setiap kesempatan rutin menyerang Indonesia mengenai HAM masyarakat Papua dan juga dukungan yang dilakukan Vanuatu terhadap gerakan separatis yang ada di Papua. (Arbar, 2020) dan dengan penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh Vanuatu melalui kemerdekaan Papua dan juga isu-isu yang digunakan Vanuatu dalam dukungannya sehingga pemerintah dapat mengantisipasi dan mengatasi hal-hal tersebut.

Tinjauan Teoritis

A. Teori National Interest

Negara sebagai sebuah aktor menjadikan kepentingan nasional sebagai salah satu pertimbangan penting dalam mengambil keputusan pada pergaulan internasional

yang akan berpengaruh bagi masyarakat negaranya. Hanya saja negara tidaklah menjadi satu-satunya kekuatan yang membentuk kepentingan nasional karena pada dasarnya negara dibentuk oleh individu-individu yang memiliki kepentingan ekonomi politik tertentu, sehingga dikatakan bahwa kepentingan nasional dikonstruksi secara sosial sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat internasional dan juga dibentuk dari pergaulan negara secara politik dalam dunia politik internasional. (Burchill, 2005) Dengan itu kepentingan nasional dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan utama suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam membantu negara lain (Sitepu, 2011).

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri (Jemadu, 2008). Dalam analisis kepentingan nasional, negara sebagai aktor akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. (Jemadu, 2008) Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.

Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar '*power*' yang dimiliki negara tersebut. Dalam penelitian ini *power* yang dimaksud bukanlah *power* sebagai kekuatan militer, namun *power* sebagai alat diplomasi yang lebih dikenal dengan *soft power* yaitu kemampuan untuk membuat suatu pihak bertindak seperti yang diinginkan pihak tertentu melalui daya tarik yang bergantung kepada kultur, nilai, dan kebijakan yang dimilikinya (Nye, 2008). Diplomasi sendiri merupakan salah satu cara sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dikatakan bahwasanya diplomasi dalam hubungan antar negara merupakan seni mengedepankan kepentingan nasional suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai terhadap negara lain (Dahlan & Mirsawati, 1995). Dalam penelitian ini kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Vanuatu sebagai sebuah negara kecil dengan pengaruh yang sangat minim adalah

meningkatkan pengaruhnya sehingga untuk itu diperlukan peningkatan *soft power* dengan tujuan dalam upaya diplomasi yang dilakukan oleh Vanuatu kedepannya akan lebih menguntungkan bagi Vanuatu.

B. Role Theory atau Teori Peran

Dalam hubungan internasional, ada dua penjelasan mengenai teori peran. Teori peran pertama kali dikemukakan oleh Holsti (1970) dalam bukunya yaitu *National Role Conception in the Study of Foreign Policy*. Teori ini menyatakan bahwa sebagai aktor, negara memiliki gambaran dan tujuan yang kemudian mendorong negara tersebut untuk bertindak. Peranan dapat diartikan sebagai tujuan dan harapan suatu negara atau aktor dalam bertindak di lingkungan sosialnya. Dalam menganalisis kebijakan yang diambil oleh negara, teori peran memiliki dua fungsi yaitu memberikan pemahaman terkait dengan perilaku kelompok yang ikut serta dalam pengambilan keputusan dan pemahaman atas harapan yang ingin dicapai atas keputusan yang diambil. Dengan itu teori peran ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri, dimulai dari individu, negara, sistem, serta bagaimana teori peran dapat digunakan sebagai analisis hubungan internasional yang lebih luas antara agen dan struktur (Thies, 2009).

Untuk memahami teori ini ada beberapa konsep yang terlebih dahulu harus dimengerti yaitu :

1. *Foreign Policy Role Performance*, konsep ini membahas hal-hal yang berkaitan tindakan, sikap, keputusan, dan juga aksi yang diambil oleh pemerintah.
2. *Policy Maker's National Role Conceptions*, merupakan kebijakan tentang tujuan atau fungsi yang dari negeri sendiri yang ditunjukkan kepada negara luar atau dalam hal lain berupa aspek pemikiran yang digunakan dalam pengambilan keputusan luar negeri.
3. *Nation's Status* yaitu perkiraan peringkat negara dalam sistem internasional.
4. *Alter's Role Prescription*, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh dalam penentuan *Role Conceptions* dimana faktor eksternal ini memiliki hubungan dengan kebijakan luar negeri. (Holsti, *National Role Conceptions in The Study of Foreign Policy*, 1970)

Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar keputusan yang diambil dalam dunia politik merupakan hasil yang berasal dari intervensi maupun tuntutan dan

harapan dari satu kelompok atau tokoh politik. Posisi kelompok atau tokoh yang berada pada posisi tinggi memungkinkannya untuk mempengaruhi keputusan dalam lingkungannya. Adanya tuntutan dan juga harapan akan menjadi acuan seorang aktor politik dalam menjalankan perannya sehingga apa yang menjadi tujuan aktor dapat dijelaskan dan diramalkan sesuai dengan peran yang ia lakukan dalam hubungan tersebut (Mas'ood, Studi Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, 1998).

Dalam penelitian ini teori peran akan digunakan untuk menjelaskan dukungan yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua atas Indonesia. Teori ini akan menggambarkan Vanuatu sebagai sebuah negara kecil yang dengan segala keterbatasan dalam perannya, berusaha menggalang bantuan dan dukungan dari negara-negara yang memiliki peranan lebih besar. Teori peran juga akan menjelaskan harapan yang ingin dicapai oleh Vanuatu melalui kemerdekaan Papua sehingga Vanuatu sangat gencar mengkampanyekan dukungan untuk kemerdekaan Papua.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini memakai cara deskriptif kualitatif, yang mana penulis menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, dan dengan data-data yang didapat menjelaskan berbagai masalah yang terdapat dalam penelitian ini.). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas seperti pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilan pemerintah dalam pidato-pidato resmi yang ada. Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah Dukungan Vanuatu, gerakan kemerdekaan Papua Barat dan juga motif yang melatarbelakangi dukungan Vanuatu bagi kemerdekaan Papua atas Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka. Teknis analisis data dilakukan secara urut yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Pembahasan

A. Upaya Kemerdekaan Papua

Gerakan kemerdekaan Papua ini sudah berjalan lama, bahkan sejak proses

perebutan Irian Barat (Papua) dari tangan Belanda. Dalam usaha perebutan Irian Barat selain menggunakan cara-cara diplomasi, Indonesia juga menggunakan cara-cara militer. Benih-benih gerakan separatis ini telah muncul sejak fase pembebasan pada tahun 1949-1963 dan dipupuk serta dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda agar dapat membentuk negara boneka Papua (Bahar, 1996). Setelah kepergian Belanda pada tahun 1962, para elit Irian Barat didikan Belanda mendirikan Organisasi Papua Merdeka sebagai awal perlawanan untuk membentuk negara Papua yang merdeka lepas dari Indonesia. Gerakan perlawanan ini terus berlanjut hingga tahun 1970 dengan meminta untuk diadakan referendum ulang.

Adanya permintaan ini dikarenakan hasil referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 yang diikuti oleh 1.022 delegasi rakyat Papua pilihan pemerintah, dengan hasil masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia dirasakan merupakan referendum yang dilakukan dibawah tekanan militer (Elisabeth, 2017). Selain itu adanya peminggiran juga minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Adanya siklus kekerasan politik yang belum tertangani, hingga pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniani. Hal-hal inilah yang semakin menambah rasa ketidakpuasan masyarakat Papua dimana mereka merasa bahwa kebijakan yang berasal dari pemerintah belumlah memberi kesejahteraan pada masyarakat Papua (Widjojo, 2009).

Hingga saat ini sedikitnya ada empat akar masalah yang menimbulkan konflik di Papua. Empat masalah itu adalah diskriminasi, penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kunjung usai, kegagalan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua dimana kondisi kemiskinan di Papua, dan pemerintah yang selalu menghindari dialog tentang status juga sejarah politik Papua (Sari, 2019). Kekecewaan ini bertambah dengan adanya beberapa kali tindakan rasisme yang dialami oleh rakyat Papua sebagaimana yang terjadi di Surabaya yaitu penggrebekan Asrama Mahasiswa Papua oleh aparat TNI, Polri, terhadap mahasiswa asal Papua. Penggerebekan ini juga diikuti dengan lontaran kata-kata rasial dan ejekan dengan nama-nama binatang yang ditunjukkan pada mahasiswa Papua dan juga memberikan ancaman bagi para penghuni asrama. Bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) ketika konferensi virtual pada 10 Desember 2020 tercatat ada 40 aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat

Papua sepanjang tahun 2020 (Nurita, 2020).

Kekecewaan inilah yang kemudian kembali memanaskan situasi dan menimbulkan keinginan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Keinginan ini didukung oleh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang merupakan organisasi negara-negara pendukung kemerdekaan Papua. Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu dan merupakan penyatu dari tiga organisasi lama yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan Papua yaitu Republik Federal Papua Barat (RFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL), dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). ULMWP yang juga terdiri dari beberapa negara anggota *Melanesia Spearhead Group* (MSG) sangat aktif mendukung kemerdekaan Papua sesuai dengan deklarasi yang disampaikan saat pendirian organisasi yang berbunyi “Kami menyatakan bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, bersatu di bawah badan baru ini dan bahwa kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk kemerdekaan” (www.ulmwp.org, n.d.).

B. Dukungan Vanuatu dalam Upaya Kemerdekaan Papua.

Sebagai salah satu negara anggota ULMWP, Vanuatu merupakan salah satu negara yang sangat aktif dan vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Negara kepulauan yang berada di Samudra Pasifik Selatan, timur laut Kaledonia Baru, timur Australia, dan barat Fiji ini memberikan dukungannya dengan memakai isu pelanggaran HAM yang ada di Papua. Permasalahan ini telah diangkat oleh Vanuatu hampir setiap tahun dalam forum dewan PBB diantaranya sidang tahunan ke-68 Majelis Umum PBB pada 28 September 2013 di New York dan juga dalam sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss pada 4 Maret 2014 (Sabir, 2018).

Vanuatu yang diwakili oleh Perdana Menteri, dalam setiap kesempatan berbicara yang diberikan selalu menjadikan isu pelanggaran HAM di Papua sebagai alasan untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil dalam pidatonya di depan Sidang Hak Asasi Manusia (HAM) pada sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke- 25 bahwa dukungan ini bukanlah perkara status politis, bukan pula sekadar perkara ekonomis. Moana menyatakan bahwa ini merupakan

keprihatinan atas perkara pelanggaran hak dan juga eksistensi bangsa Melanesia dan juga menyangkut hak-hak warga Papua sebagai bagian dari warganegara(jubi.co.id).

Hal senada juga disampaikan oleh Charlot Salwai Tabimasmay yang juga merupakan Perdana Menteri Vanuatu yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua dan Vanuatu sangat mengecam pelanggaran yang terjadi juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mendengarkan, menghormati suara rakyat Papua termasuk keinginan mereka untuk dapat menentukan nasib mereka sendiri (RDS & AGE, 2019). Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Barak Sope, Vanuatu juga telah memberikan dukungan terhadap Organisasi Papua Merdeka. Dukungan ini dengan menjadikan Vanuatu sebagai basis politik bagi Organisasi Papua Merdeka (Djopari, 1993).

C. Analisis Dukungan Vanuatu

Negara sebagai aktor sentral dalam hubungan antar negara memiliki *legal status* atau *legal equality* untuk menjalin kerjasama dan juga perjanjian dengan negara lain. Namun dalam menjalin kerjasama ataupun pengambilan keputusan dalam pergaulan internasional, *national interest* merupakan salah satu pertimbangan penting. Adanya kepentingan ini didasari oleh beberapa hal dari negara tersebut seperti kondisi politik-ekonomi, militer, sosial budaya. Kepentingan ini juga didasari akan suatu *power* sebagai pertimbangan negara agar mendapat pengakuan dunia. *Power* dalam hal ini bukanlah *power* sebagai kekuatan militer melainkan *power* sebagai alat diplomasi yang lebih dikenal dengan *soft power*. *Soft power* inilah yang ingin diciptakan oleh Vanuatu sebagai hasil dari kerjasama atau dukungan yang diberikan kepada Papua. Dukungan yang diberikan oleh Vanuatu adalah upaya untuk meningkatkan *soft power* yang dimiliki berupa pengaruh Vanuatu terhadap negara-negara yang memiliki penduduk ras Melanesia sehingga dalam proses diplomasi, pengaruh Vanuatu juga akan meningkat dan hal ini akan menguntungkan Vanuatu kedepannya.

Selain itu, kepentingan nasional juga merupakan tujuan utama sehingga suatu negara memutuskan untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang dalam hal ini adalah kebijakan untuk memberikan bantuan terhadap negara lain. Maka alasan yang dinyatakan oleh Vanuatu bahwa dukungan yang diberikan adalah semata-mata demi penegakan HAM merupakan alasan yang dibuat demi menutupi kepentingan lain atas Papua. Hal ini juga dapat dilihat dari protes yang dilakukan oleh Vanuatu hanya mengenai pelanggaran HAM atas masyarakat asli Papua, tanpa melihat upaya

pemerintah Indonesia dalam memajukan Papua seperti pemberlakuan otonomi khusus yang diberikan hanya kepada masyarakat asli Papua (Admin, n.d.). Dan jika memang alasan dari dukungan ini adalah benar-benar demi penegakan HAM, kenapa tidak ada protes yang dilakukan oleh Vanuatu kepada Australia atas penjajahan dan juga perebutan wilayah terhadap suku Aborigin yang merupakan penduduk asli Australia (Atienza, 2017).

Sesuai dengan teori peran yang dinyatakan oleh Holsti dalam menganalisis kaitan antara sumber konsepsi peran suatu negara terhadap keputusan dan tindakan yang diambil oleh negara tersebut. Teori peran mengenal konsep *national role conception*. Konsep ini menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan yang diambil suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain ada faktor ego yang merupakan konsepsi dari dalam negeri itu sendiri (Holsti, *International Politics: Framework of Analysis*, 1995). Didalam ranah hubungan internasional, ego dapat diartikan sebagai faktor domestik yang berasal dari internal negara itu sendiri. Ego ini mempengaruhi kepentingan yang ingin dicapai oleh sebuah negara atas bantuan dan kerjasama yang dilakukannya terhadap negara atau wilayah lain. Penelitian ini menemukan bahwa adanya *ego role conception* yang mempengaruhi *role performance* dari Vanuatu yaitu sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk dengan ras Melanesia, keinginan menjadi pemimpin wilayah Asia Pasifik, dan orientasi politik domestik dan luar negeri Vanuatu.

a) Kesamaan Ras Antara Vanuatu Dan Papua.

Adanya kesamaan Ras antara Vanuatu dan Papua yaitu Ras Melanesia menjadi salah satu penyebab gencarnya dukungan Vanuatu kepada Papua. Kedekatan etnis memberikan dampak hubungan emosional diantara Papua dengan Vanuatu yang biasa disebut *Melanesia Connection* (Temaluru, 2016). Melanesia sendiri bukanlah nama yang merujuk pada wilayah ataupun negara, ini lebih merupakan nama yang populer merujuk pada populasi beserta kawasan huniannya. Kata ini sendiri berasal dari dua kata yaitu *melas* yang berarti hitam dan *nesoi* yang berarti pulau-pulau. Nama ini dibuat oleh seorang pelaut botani asal Prancis pada tahun 1832 dan digunakan untuk menyebut populasi masyarakat kulit hitam yang mendiami kawasan kepulauan mulai dari ujung barat Lautan Pasifik hingga Fiji (Putrohari & ,dkk, 2015).

Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan Papua sebagai bagian dari NKRI dengan dasar perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan, Vanuatu menganggap Papua sebagai bagian dari kesatuan ras Melanesia yang memang

merupakan ras dari seluruh masyarakat Vanuatu dan dianggap sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh ras Melanesia yang ada di Pasifik Selatan.

Ideologi kesamaan ras ini telah tertuang dalam konstitusi hukum Vanuatu dan menjadi pegangan konstitusional, ada pasal yang mengatakan bahwa mereka, berdasarkan asas solidaritas, harus memperjuangkan bangsa Melanesia, pasal tersebut berbunyi:

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF VANUATU

*WE, the people of Vanuatu,
PROUD of our struggle for freedom,
DETERMINED to safeguard the achievements of this struggle,
CHERISHING our ethnic, linguistic and cultural diversity,
MINDFUL at the same time of our common destiny,
HEREBY proclaim the establishment of the united and free Republic of
Vanuatu founded on
traditional Melanesian values, faith in God, and Christian principles,
AND for this purpose give ourselves this Constitution (www.gov.vu).*

Ideologi yang telah menjadi konstitusi hukum resmi Vanuatu sekaligus menjadi pegangan konstitusional ini menjadi salah satu faktor dari dukungan yang diberikan oleh Vanuatu kepada Papua. Dalam teori peran, hal ini masuk kedalam konsep *Foreign Policy Role Performance*, yaitu sikap atau aksi yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hal yang berasal dari negaranya sendiri yang dalam hal ini adalah konstitusi resmi yang menyatakan bahwa Vanuatu dengan asas solidaritas harus memperjuangkan kemerdekaan sesama ras Melanesia.

Kepercayaan ini merupakan kepercayaan atas dasar solidaritas kesamaan sejarah agar terbebas dari kolonialisme. Doktrin ini yang yang disebarkan oleh Vanuatu ke negara sekitar yang masih berada dalam satu ras agar bersama-sama mendukung ras Melanesia yang mereka anggap masih terjajah (Helmy, 2019).

b) Keinginan Menjadi Pemimpin Wilayah Asia Pasifik.

Sejalan dengan kepentingan atas kesamaan ras Vanuatu menginginkan adanya persatuan Ras Melanesia di wilayah Pasifik Selatan. Persatuan ras ini berupa ikatan kohesivitas etnis dan hubungan emosional antara Papua dan Vanuatu dan tiap ras Melanesia yang belum memperoleh kemerdekaan yang dalam hal ini adalah Papua. Ini dilakukan melalui hubungan diplomatik melalui berbagai forum regional maupun internasional (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019).

Dengan mengangkat isu pelanggaran HAM, sangat terlihat keinginan Vanuatu untuk menjadi *leading actor* dalam kemerdekaan Papua dimana Vanuatu selalu membawa masalah pelanggaran HAM ini kedalam isu internasional, dan ditambah dengan kenyataan bahwa Vanuatu merupakan negara yang telah mengikutsertakan perwakilan dari *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) kedalam forum internasional (Temaluru, 2016). Ideologi kesamaan ras Melanesia yang digunakan Vanuatu hanyalah alasan yang digunakan Vanuatu untuk membentuk paradigma kerjasama sub-kawasan di Pasifik Selatan yang merupakan kerjasama antar negara yang memiliki kesamaan ras. Usaha yang dilakukan oleh Vanuatu ini merupakan usaha menjadi pusat ideologi dan juga usaha menjadi pemimpin dari negara-negara Asia Pasifik.

Dukungan kemerdekaan dan juga ideologi kesatuan ras Melanesia hanyalah sebatas alat politik yang dipakai Vanuatu demi kepentingan negaranya (Helmy, 2019). Ini bisa dipahami karena Papua bukanlah satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki penduduk dengan ras Melanesia. Namun hampir sebagian dari wilayah timur Indonesia merupakan keturunan ras Melanesia (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019).

Orientasi politik ini juga sesuai dengan konsep lain yang ada dalam teori peran yaitu *Nation's Status* atau perkiraan peringkat dan pengaruh suatu negara dalam sistem internasional. Sebagaimana dijabarkan di atas bahwa Vanuatu merupakan sebuah negara kecil sehingga hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam hubungan internasional. Maka dukungan ini menjadi momentum bagi Vanuatu untuk meningkatkan pengaruhnya khususnya di wilayah Asia Pasifik dengan menjadi pusat ideologi dalam menyatukan ras Melanesia untuk kemudian menjadi negara pelopor dalam kerjasama dan juga kemajuan ekonomi wilayah Asia Pasifik.

Sebagaimana pernyataan Bernard Narokobi bahwa wilayah Melanesia adalah Papua atau Papua Barat, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan juga Fiji (Golub, 2016).

c) Orientasi Politik Domestik dan Luar Negeri Vanuatu.

Dalam konsep *Policy Maker's National Role Conceptions* pada teori peran, yaitu gambaran kebijakan yang cocok untuk negaranya sendiri yang ditunjukkan kepada negara luar. Dengan kata lain aspek ini adalah aspek penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan politik luar negeri. Pengambilan keputusan

terkait dengan politik luar negeri Vanuatu tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahannya.

Sistem pemerintahan di Vanuatu menjadikan posisi Perdana Menteri lebih tinggi dari Presiden dimana Perdana Menteri merupakan pemimpin di parlemen sekaligus kepala pemerintahan. Namun dalam praktik pemerintahannya, pemerintah Vanuatu juga memberikan pengakuan bagi para kepala suku di Vanuatu. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa pemerintah negara Vanuatu menghormati *local wisdom* yang dianut dan inilah yang membuat ideologi *Melanesian brotherhood* menjadi penting dalam pemerintahan Vanuatu yang mempengaruhi politik luar negeri Vanuatu sendiri (Zahidi, 2020).

Dalam hal ini adanya doktrin *Melanesian Renaissance* yaitu kesamaan atas setiap individu dalam ras Melanesia yang ada didalam konstitusi hukum resmi Vanuatu dan juga juga keinginan menjadi pemimpin di wilayah Asia Pasifik menjadikan politik domestic Vanuatu memiliki orientasi politik dalam politik luar negerinya yang disebut juga dengan *domestic influence*, yaitu upaya dalam membangun *soft power* dengan cara mencari kekuatan dengan membentuk koalisi dengan negara lain. (Hamid, 1998).

Dibentuknya *Pacific Islands of West Papua* (PIWP) bersama Kepulauan Solomon Vanuatu telah berhasil menjaring dukungan dari negara-negara Asia Pasifik lainnya. Kebutuhan atas kerjasama dengan negara lain jugalah yang membuat Vanuatu sangat reaktif dalam setiap forum, ini merupakan usaha Vanuatu untuk menarik perhatian dari negara lain untuk ikut memberikan bantuan dan dukungan kepada Vanuatu (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019). Sekretaris untuk parlemen di Kantor Perdana Menteri Vanuatu, Johny Konapo menyatakan bahwa dengan kerjasama ini Vanuatu yang sebelumnya merupakan pejuang tunggal kemerdekaan Papua, kini telah ada tujuh negara baru yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Papua yaitu Kepulauan Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Kiribati dan Tonga (Cullwick, 2017).

Selain itu, Vanuatu sejak kemerdekaannya pada tahun 1980 setelah merasakan kesulitan dalam memperoleh kemerdekaan atas penjajahan yang bersifat Condominium yaitu wilayah kolonial yang keadaulatan dibagi oleh dua negara yang berbeda. Ini menjadikan sistem politik luar negeri vanuatu sangat anti atas penjajahan. Pengalaman atas penjajahan tersebut membentuk orientasi politik luar negeri Vanuatu bertujuan untuk membebaskan negara-negara yang masih terjajah yang dalam hal ini adalah dukungan Vanuatu bagi kemerdekaan Papua (Hamid, 1998).

Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan tiga kepentingan atas dukungan-dukungan yang dilakukan Vanuatu atas upaya Papua untuk merdeka yaitu kesamaan ras antara Vanuatu dan Papua, keinginan menjadi pemimpin wilayah Asia Pasifik, dan Orientasi politik domestik dan luar negeri Vanuatu. Kesamaan ras menjadi salah satu penyebab gencarnya dukungan Vanuatu atas Papua. Vanuatu menaggap Papua merupakan bagian dari rumpun Melanesia dan dianggap sebagai kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari seluruh ras Melanesia yang berada di Asia Pasifik. Ideologi ini juga tertuang dalam konstitusi hukun dan menajdi pegangan konstitusional negara Vanuatu.

Selanjutnya adalah keinginan menjadi pemimpin di wilayah Asia Pasifik. Ideologi kesatuan ras sebagai upaya untuk menyatukan ikatan dan hubungan emosional antara Papua, Vanuatu dan juga setiap ras Melanesia merupakan upaya Vanuatu untuk menarik simpati dari setiap negara di Asia Pasifik. Hal ini kemudian digunakan Vanuatu untuk membentuk kerjasama sub-kawasan di Pasifik Selatan dan merupakan usaha yang dilakukan oleh Vanuatu untuk menjadi pusat ideologi dan juga usaha menjadi pemimpin dari negara-negara Asia Pasifik.

Kepentingan selanjutnya adalah orientasi politik domestik dan luar negeri Vanuatu. Pemeirntahan Vanuatu merupakan pemerintahan yang menghormati *local wisdom* sehingga doktrin *Mellanesia Renaissance* menjadi penting dalam pemerintahan Vanuatu. Sejalan dengan keinginan untuk menajdi pemimpin di wilayah Asia Pasifik menjadikan politik domestic Vanuatu memiliki orientasi politik dalam politik luar negerinya yang disebut juga dengan *domestic influence*, yaitu upaya dalam membangun *soft power* dengan cara mencari kekuatan dengan membentuk koalisi dengan negara lain. Hal inilah yang dilakukan oleh Vanuatu dengan menggalang dukungan dalam setiap forum yang dimiliki.

Daftar Pustaka

Buku

- Bahar, S. (1996). *Intergrasi Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djopari, J. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Golub, A. (2016). *Bernard Narokobi, The Melanesian Way, and the Law Reform Commission of Papua New Guinea*. Manoa: Department of Anthropology, University of Hawai'i.
- Hamid, Z. (1998). *Politik di Melanesia*. Jakarta: Pustaka Press.
- Putrohari, R. D., & ,dkk. (2015). *DIASPORA Melanesia di Nusantara*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Syamsudin, N. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Widjojo, M. S. (2009). *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, And Securing The Future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Publk*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2010). *International Relations*. New York: Longman.
- Holsti, K. (1995). *International Politics: Framework of Analysis*. New Jersey: prentice Hall.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khotari, C. (2004). *Research Methodology*. Jaipur: New Age Intenational Publisher.
- Mas'oeed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitepu, P. A. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif:Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oeed, M. (1998). *Studi Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.

Artikel Jurnal

- Drs. Berlian Helmy, M. (2019). Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 21-27.
- Putra, G. N., Legionosuko, T., & Madjid, A. (2019). INDONESIA'S STRATEGY FOR MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) MEMBER IN FACING FREE PAPUA MOVEMENT PROPAGANDA: STUDY CASE OF REPUBLIC VANUATU. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 31-44.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 91-108.
- Temaluru, T. B. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 572-583.
- Yulizarti, F. (2018). DUKUNGAN VANUATU TERHADAP UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) DALAM MEMERDEKAKAN PAPUA BARAT TAHUN 2013-2017. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Jakarta*, 15-27.
- Zahidi, M. S. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia. *Mandala : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 65-78.
- Fadhilah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini. *Indonesian Perspective*, 59-81.

Artikel dan Situs Resmi

- Admin. (n.d.). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/352>, diakses pada 5 Mei 2021.
- www.gov.vu. (n.d.). Retrieved from www.gov.vu/index.php/about/constitution-of-vanuatu diakses pada 8 Mei 2021.
- www.ulmwp.org. (n.d.). Retrieved from www.ulmwp.org diakses pada 7 Mei 2021.

Artikel dan Situs Daring

- Admin. (2014, Maret 6). INDONESIA TEGAS MENOLAK PIDATO PM VANUATU. Retrieved from <https://jubi.co.id/indonesia-tegas-menolak-pidato-pm-vanuatu/> , diakses pada 5 Mei 2021.
- Atienza, J. (2017, September 8). Penduduk Asli Australia, Aborigin Hingga Kini Masih Memperjuangkan Pengakuan. Retrieved from [tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/penduduk-asli-australia-aborigin-hingga-kini-masih-memperjuangkan-pengakuan](https://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/penduduk-asli-australia-aborigin-hingga-kini-masih-memperjuangkan-pengakuan), diakses pada 6 Mei

2021.

- Cullwick, J. (2017, September 16). PS Koanapo says issue of West Papua now gone beyond the region. Retrieved from Daily Post: https://dailypost.vu/news/ps-koanapo-says-issue-of-west-papua-now-gone-beyond/article_d3f9f3f4-67ab-5bfb-b8d5-6200a27eb43a.html, diakses pada 6 Mei 2021.
- Elisabeth, E. (2017, November 22). Memahami akar masalah Papua dan penyelesaiannya: jangan gegabah. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785>, diakses pada 6 Mei 2021.
- Hasan, R. A. (2019, September 30). Konstitusi hingga Benny Wenda, Ini Alasan Vanuatu Kerap Usik RI Soal Papua? Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/4075249/konstitusi-hingga-benny-wenda-ini-alasan-vanuatu-kerap-usik-ri-soal-papua>, diakses pada 7 Mei 2021.
- Nurita, D. (2020, Desember 10). KontraS Catat 40 Aksi Kekerasan di Papua Sepanjang 2020. Retrieved from tempo.co: <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1413430/kontras-catat-40-aksi-kekerasan-di-papua-sepanjang-2020>, diakses pada 7 Mei 2021.
- RDS, & AGE. (2019, September 29). Pidato di PBB, Vanuatu Singgung Dugaan Pelanggaran HAM Papua. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190929112102-134-435076/pidato-di-pbb-vanuatu-singgung-dugaan-pelanggaran-ham-papua>, diakses pada 7 Mei 2021.
- Sari, H. P. (2019, Agustus 8). Peneliti LIPI: Ada 4 Akar Masalah di Papua yang Belum terselesaikan Pemerintah. Retrieved from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/13143311/peneliti-lipi-ada-4-akar-masalah-di-papua-yang-belum-terselesaikan>, diakses pada 7 Mei 2021.